

# *Collaborative Governance* Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sinjai)

## *Collaborative Governance of Tourism Development in Increasing Local Own-Source Revenue* (Case Study: Local Regulation No. 6 of 2013 Concerning Tourism Development in Sinjai Regency)

Ahmad Hamdan Muallim<sup>1\*</sup>, Juharni<sup>1</sup>, Muh. Ridha Suaib<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

\*E-mail: muallimhamdan@gmail.com

Diterima: 27 Agustus 2024/Disetujui 30 Desember 2024

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran collaborative governance dalam pengembangan pariwisata sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengembangan Pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam implementasi kebijakan pariwisata, dengan studi kasus di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, yang memiliki destinasi wisata Taman Nasional Hutan Mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, telah berhasil mendorong pengembangan infrastruktur, promosi destinasi, serta peningkatan kualitas layanan pariwisata. Namun, masih terdapat kendala dalam koordinasi dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan sinergi antar pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan peningkatan PAD melalui sektor pariwisata. Dalam hal ini, kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk pengembangan pariwisata yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sinjai.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Pengembangan PAD, Pariwisata

**Abstract.** This research aims to analyse the role of collaborative governance in tourism development as an effort to increase Local Own-source Revenue (PAD) in Sinjai Regency, with a focus on Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Tourism Development. This research uses a descriptive qualitative approach to examine the interaction between the government, the community, and the private sector in the implementation of tourism policies, with a case study in Tongke-Tongke Village, East Sinjai District, which has a Mangrove Forest National Park tourist destination. The results showed that collaboration between stakeholders, such as local governments, communities, and the private sector, has succeeded in encouraging infrastructure development, destination promotion, and improving the quality of tourism services. However, there are still obstacles in coordination and active community participation. This research also found that strengthening synergies between parties is needed to achieve the goal of increasing PAD through the tourism sector. In this case, collaboration between the Tourism Office and the community is a key factor in strengthening sustainable tourism development. Thus, the results of this study are expected to provide recommendations for policy makers in formulating more effective strategies for tourism development that contribute to increasing the PAD of Sinjai Regency.

**Keyword:** *Collaborative Governance*, Local Own-source Revenue (PAD) Development, Tourism



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Pendahuluan

Pariwisata merupakan suatu bidang yang mempelajari perjalanan dan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi, termasuk aspek motivasi, perilaku, dan pengalaman mereka (Bambang Supriadi & Roedjinandari, 2017). Selain itu, pariwisata juga melibatkan analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ini. Salah satu fokus utama dalam pengembangan pariwisata adalah bagaimana mengelola dampaknya secara berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada nilai-nilai etika, pelestarian budaya, dan hak-hak masyarakat lokal (Al Mustaqim, 2023). Evaluasi terhadap keadilan dan

tanggung jawab dalam sektor pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan industri ini memberikan manfaat positif bagi masyarakat, melindungi lingkungan, dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi (Veronica & Rivabelle, 2024).

Kabupaten Sinjai, dengan berbagai keunggulan alam dan budaya, memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan wisata unggulan. Keindahan alamnya, yang mencakup pegunungan, air terjun, dan pantai eksotis, menjadikannya daya tarik utama bagi wisatawan. Selain itu, kabupaten ini kaya akan tradisi lokal yang tercermin dalam festival dan acara seni, memberikan pengalaman autentik bagi pengunjung. Situs sejarah dan kuliner khas juga menambah daya tarik wisata yang ditawarkan, yang jika dikembangkan secara berkelanjutan, dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal.

Salah satu objek wisata yang memiliki potensi besar adalah Taman Nasional Hutan Mangrove Tongke-Tongke. Terletak di pesisir Kabupaten Sinjai, taman nasional ini bukan hanya penting sebagai habitat bagi flora dan fauna langka, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung garis pantai dan tempat edukasi lingkungan. Potensi ekowisata di Tongke-Tongke dapat menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung, serta mendukung upaya pelestarian alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Wibowo (2008) mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan tujuan rekreasi dan hiburan. Dalam konteks ini, pengelolaan sektor pariwisata yang efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui mekanisme *collaborative governance*. Ansell & Gash (2008) menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah proses pengambilan keputusan bersama antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk mengelola aset publik, termasuk sumber daya yang terkait dengan sektor pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pariwisata setempat, sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong investasi infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, keberagaman budaya dan keindahan alam Sinjai, seperti wisata alam dan budaya lokal, dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional. Sebagai contoh, pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi lokal. Oleh karena itu, strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif sangat penting untuk memaksimalkan potensi ini dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengembangan Pariwisata.

## Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kualitatif pada umumnya didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang sifatnya alamiah, dimana kemudian peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci, dan selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data yang sifatnya induktif, serta hasil penelitian yang menekankan pada makna. Terkait data penelitian digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung terjun ke lapangan (*research area*) untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, dengan menggunakan metode survei yaitu wawancara dan metode observasi yaitu dengan pencatatan serta foto kegiatan. Sedangkan data sekunder yang sifatnya mendukung keperluan data primer misalnya catatan atau dokumentasi berupa absensi, data kantor yang terkait, dan penelusuran data online. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan), wawancara (Interview) dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sinjai Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013 sebagai Bentuk Peningkatan PAD

#### a. Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai dimulai dengan dialog tatap muka antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Proses ini bukan hanya sebatas komunikasi formal, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun hubungan saling percaya, rasa hormat, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap tujuan bersama. Seperti yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2007), dialog tatap muka adalah tahap awal yang sangat penting untuk mencegah potensi konflik yang bisa muncul di kemudian hari. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pariwisata, proses dialog tatap muka ini menjadi sarana utama untuk memastikan bahwa setiap pihak terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di kawasan Taman Nasional Hutan Mangrove Tongke-Tongke.

Salah satu pernyataan yang muncul dalam wawancara mengatakan,

*“Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Pasal 2, pengembangan pariwisata di Sinjai tidak hanya untuk meningkatkan PAD, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, khususnya di sekitar Taman Nasional Hutan Mangrove Tongke-Tongke. Antusiasme para stakeholder sangat intens, dan rapat selalu dihadiri oleh perwakilan langsung.”* (Wawancara, 6 September 2024)

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, terlihat bahwa dialog tatap muka sangat penting dalam membangun hubungan yang saling percaya antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Peraturan Daerah No. 6 Tahun

2013 menjadi dasar hukum yang mengatur pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai, dan dialog tatap muka memungkinkan para stakeholder untuk memahami tujuan dan peran masing-masing. Pernyataan ini mengindikasikan pentingnya kehadiran fisik para pihak terkait dalam setiap pertemuan untuk menciptakan komitmen yang kuat terhadap proses kolaborasi.

b. **Membangun Kepercayaan (Trust Building)**

Kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap proses kolaboratif, dan dalam konteks pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai, hal ini sangat ditekankan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya. Kepercayaan dibangun melalui transparansi dalam komunikasi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Dalam wawancara, seorang pejabat Dinas Pariwisata menyatakan,

*“Dinas Pariwisata selalu transparan dalam segala aktivitas selama kerja sama berlangsung. Semua saran dari masyarakat dan stakeholder kami akomodasi untuk menjaga kepercayaan.”* (Wawancara, 6 September 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan bukan hanya terjadi karena adanya komunikasi yang baik, tetapi juga karena proses yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Proses transparansi ini memiliki peran yang sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakpuasan yang bisa mengganggu jalannya kolaborasi. Misalnya, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan, pemerintah tidak hanya menunjukkan keseriusan dalam mendengarkan kebutuhan mereka, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya transparansi, potensi konflik atau ketidakpuasan yang mungkin muncul dapat menurunkan tingkat partisipasi dan mengurangi efektivitas dari pengelolaan pariwisata itu sendiri.

c. **Komitmen terhadap Proses (Commitment to the Process)**

Komitmen terhadap proses merupakan aspek penting dalam menjaga kelancaran jalannya collaborative governance. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai menunjukkan komitmennya dengan memberikan prioritas kepada masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan pengelolaan pariwisata, seperti tender pemeliharaan dan pengadaan kebutuhan wisata. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara,

*“Masyarakat setempat diberi prioritas dalam tender pembaruan dan pemeliharaan, serta diutamakan dalam pengadaan kebutuhan dari pedagang lokal.”* (Wawancara, 6 September 2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Sinjai tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi daerah, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan memberikan prioritas kepada masyarakat dalam tender pengelolaan fasilitas wisata, pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan wisata. Komitmen ini menjadi bukti bahwa proses collaborative governance di Sinjai berjalan dengan prinsip keadilan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal.

d. **Pemahaman Bersama (Shared Understanding)**

Pemahaman bersama antar stakeholder dalam collaborative governance sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Wawancara dengan salah satu stakeholder menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam mendorong pengusaha lokal untuk memproduksi cenderamata, ada kesepakatan bahwa sektor ekonomi kreatif, seperti produksi cenderamata, harus dilibatkan.

*“Kami terus berupaya mendorong ekonomi kreatif seperti produksi cenderamata agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar”* (Wawancara, 6 September 2024).

Pemahaman bersama ini merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki tujuan yang sejalan dalam meningkatkan sektor pariwisata. Dalam kolaborasi ini, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat setempat sepakat bahwa produk cenderamata merupakan salah satu aspek penting yang dapat mendorong perekonomian daerah. Cenderamata khas daerah tidak hanya memberikan nilai tambah bagi pengusaha lokal tetapi juga berfungsi sebagai identitas pariwisata yang memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan. Dengan adanya pemahaman bersama mengenai pentingnya sektor ekonomi kreatif, diharapkan produk cenderamata yang dihasilkan dapat memperkuat daya tarik pariwisata dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat lokal.

e. **Hasil Akhir Sementara (Intermediate Outcome)**

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Taman Nasional Hutan Mangrove Tongke-Tongke telah menghasilkan beberapa hasil yang signifikan. Salah satunya adalah kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola beberapa fasilitas wisata, seperti perdagangan dan pengelolaan parkir, yang memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan ekonomi lokal. Dalam wawancara, salah satu narasumber menyatakan,

*“Masyarakat Desa Tongke-Tongke diberi izin berdagang dan mengelola fasilitas wisata di kawasan Taman Nasional Hutan Mangrove.”* (Wawancara, 6 September 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya membawa manfaat bagi sektor pariwisata, tetapi juga memberikan peluang ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Hasil akhir dari kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal telah menjadi bagian integral dari pengelolaan kawasan wisata. Dengan adanya izin berdagang dan pengelolaan fasilitas wisata, masyarakat dapat memperoleh pendapatan langsung dari sektor pariwisata, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka. Lebih jauh lagi, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan fasilitas wisata juga meningkatkan rasa memiliki terhadap kawasan wisata, yang berpotensi meningkatkan keberlanjutan pengelolaan kawasan tersebut.

## 2. Potensi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sinjai dalam Menunjang PAD

Kabupaten Sinjai memiliki berbagai destinasi wisata dengan potensi besar, seperti Taman Purbakala Batu Pake Gojeng, Air Terjun Lembang Saukang, Pulau Larea-rea, dan Taman Nasional Hutan Mangrove Tongke-Tongke. Namun, meskipun potensi ini sudah ada, sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai belum dapat berkontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor pertanian dan pendidikan dalam perekonomian daerah. Dalam wawancara, Dewi Angreaini, seorang pejabat Dinas Pariwisata, mengungkapkan,

*“Sebagus apa pun upaya pemerintah, tanpa dukungan masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha, dampak ekonomi dari pariwisata tidak akan optimal.”* (Wawancara, Dewi Angreaini, 6 September 2024)

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun pemerintah sudah menciptakan berbagai kebijakan dan infrastruktur untuk mengembangkan sektor pariwisata, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat lokal, pelatihan, dan penyediaan akses ke peluang usaha menjadi langkah yang krusial agar sektor pariwisata dapat berkembang lebih maksimal. Event tahunan seperti Sinjai Culture Carnival juga dapat menjadi salah satu contoh bagaimana pariwisata dapat memperkenalkan budaya lokal sekaligus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Keberhasilan acara ini dalam menarik lebih dari 10.000 pengunjung menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, pariwisata dapat menjadi sektor unggulan yang mendukung PAD.

## 3. Kerja Sama antara Dinas Pariwisata dan Masyarakat

### a. Mempekerjakan Masyarakat Setempat

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan pariwisata di Sinjai adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Hutan Mangrove. Dengan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal, pemerintah tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan bahwa keberlanjutan pengelolaan pariwisata dapat terjaga dengan baik. Dalam wawancara, seorang pejabat Dinas Pariwisata mengatakan,

*“Pekerjaan pengelolaan kawasan taman diberikan kepada masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja baru.”* (Wawancara, 6 September 2024)

Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata memungkinkan mereka merasakan manfaat dari sektor pariwisata secara langsung dan meningkatkan partisipasi mereka dalam menjaga kelestarian kawasan wisata.

### b. Izin Berdagang

Pemberian izin berdagang tanpa biaya sewa di sekitar kawasan wisata adalah bentuk lain dari pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di Sinjai. Pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi pariwisata, yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi pedagang lokal tetapi juga meningkatkan daya tarik wisatawan. Salah satu narasumber menjelaskan,

*“Kami menyediakan warung terapung yang menjual minuman tradisional seperti sarabba dan makanan khas seperti pisang goreng.”* (Wawancara, 6 September 2024)

Dengan memberikan izin berdagang tanpa biaya sewa, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi pariwisata, yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi pedagang lokal tetapi juga menambah daya tarik bagi wisatawan.

### c. Pengelolaan Parkiran

Selain izin berdagang, beberapa warga juga memanfaatkan lahan pribadi mereka di sekitar kawasan wisata untuk dijadikan tempat parkir. Ini merupakan contoh bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendukung sektor pariwisata. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara,

*“Lahan parkir yang dikelola warga menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang mendukung ekonomi lokal.”* (Wawancara, 6 September 2024)

Pemanfaatan lahan parkir ini adalah contoh bagaimana masyarakat bisa mengambil inisiatif dalam mengelola sumber daya lokal yang ada untuk mendukung sektor pariwisata. Ini juga menunjukkan fleksibilitas dan kreativitas masyarakat dalam menyikapi peluang yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai telah berjalan cukup efektif. Dialog tatap muka, transparansi, komitmen, dan pemahaman bersama terbukti menjadi pilar utama dalam keberhasilan kolaborasi. Meski tantangan masih ada, seperti minimnya pelaku ekonomi kreatif di sektor cenderamata, sinergi yang terjalin telah memberikan manfaat nyata bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Potensi besar pariwisata Kabupaten Sinjai, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi pilar utama PAD di masa depan. Strategi yang melibatkan masyarakat secara aktif, seperti pemberdayaan ekonomi lokal melalui izin berdagang, pengelolaan parkir, dan pengembangan ekowisata, perlu terus diperkuat. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi sektor unggulan yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## B. Pembahasan

Salah satu faktor penting dalam implementasi *collaborative governance* di Kabupaten Sinjai adalah dialog tatap muka antar stakeholder. Proses ini bukan hanya sekadar untuk mempertemukan pihak-pihak terkait, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun kepercayaan, komunikasi yang terbuka, serta kesepahaman mengenai tujuan bersama. Dialog tatap muka antar stakeholder merupakan elemen penting dalam implementasi *collaborative governance* di Kabupaten Sinjai. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk mempertemukan pihak-pihak terkait, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang terbuka. Dialog langsung memungkinkan identifikasi peluang untuk keuntungan bersama dan meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam komunitas (Mahjud *et al.*, 2023). Selain itu, komunikasi tatap muka yang mendalam dapat

mengurangi stereotip dan perbedaan, yang sangat penting untuk proses pembelajaran yang efektif (Woldesenbet, 2020). Dengan adanya dialog yang rutin, stakeholder merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan, yang merupakan langkah awal yang krusial untuk keberhasilan kolaborasi (Perwira, 2023). Oleh karena itu, kualitas interaksi dalam dialog tatap muka sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan di daerah tersebut.

Kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Membangun kepercayaan ini memerlukan waktu dan upaya yang konsisten, termasuk transparansi dan komunikasi yang efektif (Gong & Bao, 2022). Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Sinjai menunjukkan komitmennya untuk membuka ruang bagi masukan masyarakat, yang berkontribusi pada penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efisien dan transparan selama proses kolaborasi sangat penting untuk membangun kepercayaan (Koning *et al.*, 2016). Selain itu, kepercayaan yang terbangun secara bertahap memberikan stabilitas dalam kolaborasi dan mempercepat pencapaian tujuan bersama, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pariwisata. Oleh karena itu, membangun kepercayaan tidak hanya penting untuk keberhasilan kolaborasi, tetapi juga untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik.

Komitmen terhadap proses adalah aspek penting dalam collaborative governance yang harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat. Dalam pengembangan pariwisata Taman Nasional Hutan Mangrove Tongke-Tongke, Dinas Pariwisata Sinjai menunjukkan komitmen yang tinggi dengan memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam proses tender dan pemeliharaan objek wisata. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahap pengelolaan wisata tidak hanya meningkatkan rasa memiliki tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung kepada mereka (Ramdani & Purnomo, 2022). Proses yang transparan dan adil dalam pengelolaan ini berfungsi untuk mengurangi potensi konflik dan memperkuat kolaborasi antar pihak, seperti yang diungkapkan oleh Ulibarri (Ulibarri, 2015), yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian, komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata menjadi kunci dalam menciptakan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.

Kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat sering kali menjadi kendala dalam kolaborasi, terutama dalam pengembangan sektor pariwisata. Proses shared understanding sangat penting untuk menyamakan persepsi dan tujuan di antara seluruh stakeholder. Pemerintah Kabupaten Sinjai menyadari hal ini dan berupaya menciptakan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam ekonomi kreatif, meskipun masih ada tantangan seperti kurangnya pengusaha cinderamata di lokasi wisata. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata tidak hanya meningkatkan rasa memiliki tetapi juga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kualaria *et al.*, 2022; Megawati *et al.*, 2022). Upaya untuk membangun pemahaman bersama ini dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat kolaborasi antar pihak, yang merupakan kunci untuk memastikan bahwa semua pihak bergerak menuju tujuan yang sama dalam pengembangan pariwisata (Gautama *et al.*, 2020; Permatasari, 2022).

Taman Nasional Hutan Mangrove Tongke-Tongke memiliki potensi ekowisata yang sangat besar, baik dari segi konservasi lingkungan maupun dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran taman nasional ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam sektor pariwisata, baik melalui pekerjaan langsung sebagai pengelola wisata maupun dengan membuka usaha seperti warung makanan dan minuman. Selain itu, taman mangrove ini juga berfungsi sebagai penahan erosi pantai dan memberikan manfaat ekologis lainnya yang sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan memanfaatkan potensi tersebut, Kabupaten Sinjai berupaya mengembangkan pariwisata berbasis konservasi yang berkelanjutan.

Keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai sangat mengedepankan kolaborasi dengan masyarakat setempat. Salah satunya adalah dengan memberi izin kepada masyarakat untuk mengelola usaha kecil seperti warung makan dan cinderamata. Langkah ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pemberdayaan ekonomi lokal. Sinergi yang kuat antara kedua belah pihak ini akan memastikan keberlanjutan sektor pariwisata yang dapat mendukung PAD Kabupaten Sinjai.

Sektor ekowisata merupakan salah satu pilar yang menjanjikan dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai. Taman Nasional Hutan Mangrove Tongke-Tongke memiliki keunggulan sebagai daya tarik wisata alam yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Ekowisata dapat menjadi sumber PAD yang tidak hanya bergantung pada jumlah wisatawan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, agar dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi daerah.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai harus didorong oleh prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup pelestarian budaya dan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata. Pemerintah daerah telah berupaya memperkenalkan berbagai program dan event yang melibatkan masyarakat, seperti *Sinjai Culture Carnival*, untuk mempromosikan budaya lokal serta meningkatkan kunjungan wisatawan. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, pariwisata di Sinjai diharapkan dapat berkembang tanpa merusak lingkungan atau budaya lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan bagi masyarakat.

Meskipun potensi pariwisata Kabupaten Sinjai cukup besar, pengembangan sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pengusaha cinderamata yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain itu, infrastruktur yang terbatas juga menjadi kendala dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Pemerintah Kabupaten Sinjai perlu fokus pada peningkatan infrastruktur dan pengembangan produk wisata yang lebih beragam agar sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Diperlukan juga perhatian terhadap manajemen sampah dan keberlanjutan lingkungan agar pariwisata tidak merusak daya tarik alam yang ada.

Sektor swasta, termasuk perbankan dan investor, memainkan peran penting dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai. Kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Bank Indonesia, misalnya, menjadi salah satu contoh keberhasilan

kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah melalui pariwisata. Selain itu, peran sektor swasta dalam membangun fasilitas wisata, seperti akomodasi, restoran, dan transportasi, sangat mendukung pencapaian tujuan pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan kabupaten sinjai sudah berjalan sebagaimana yang di atur oleh perda bab II asas, fungsi dan tujuan dari peraturan penyelenggaraan usaha kepariwisataan kabupaten sinjai. Bahwa kemudian peraturan daerah memberikan kebermanfaatan oleh kehadiran penyelenggaraan usaha kepariwisataan dalam hal ini yang di kendalikan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan telah menjalankan BAB II sesuai kebijakan tersebut. Yang dimana kehadiran destinasi wisata di sekitar masyarakat setempat mendapatkan dampak positif atau kebermanfaatan yang saling menguntungkan. Hal ini kemudian sangat berkorelasi dengan konsep collaborative governance yang dimana suatu pemerintahan atau organisasi di tuntut untuk melakukan program kerja yang memberikan kebermanfaatan dengan masyarakat. Begitu pula sebaliknya masyarakat yang memberikan kebermanfaatan kepada pemerintah, *collaborative governance* kemudian sangat terasa pada implementasi peraturan daerah ini telah memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

## **Daftar Pustaka**

- Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26-43.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Bambang Supriadi, S. E., & Roedjinandari, N. (2017). *Perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata*. Universitas Negeri Malang.
- Gautama, B., Yuliawati, A., Nurhayati, N., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Bernas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355-369.
- Gong, W. and Bao, Y. (2022). Assessing Trust in Online Collaboration In E-Government During the Covid-19 Pandemic: An Employee Perspective.
- Koning, M., Parr, J., Sengchanthavong, S., & Phommasane, S. (2016). Collaborative Governance Improves Management Effectiveness of Hin Nam No National Protected Area in Central Lao Pdr. Parks, 22(2), 27-40.
- Kualaria, S., Wijyantini, B., & Hanafi, I. (2022). Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 20-26.
- Mahjud, J., Haning, T., Lambali, S., & Mufidah, N. (2023). Collaborative Governance in Program Implementation Fish Apartment in East Luwu. *Legal Brief*, 11(6), 3584-3590.
- Megawati, V., Setyawan, A., Hananto, H., Dewi, H., Benarkah, N., Praton, A., ... & Juniati, N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Faktor Pengungkit Pengembangan Desa Wisata: Studi Kasus Pada Wisata Sawah Sumber Gempong. *Inobis Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(4), 569-580.
- Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) Di Bali. *Kertha Wicaksana*, 16(2), 164-171.
- Perwira, R. (2023). A Model of Collaborative Governance for Religious Education Book Assessment Program. *International Journal of Business Law and Education*, 4(2), 428-434.
- Ramdani, R. and Purnomo, E. (2022). Shifting Conflict into Collaboration: Peatland Fires Mitigation in The Biosphere Conservation Transition Zone in Sumatra, Indonesia. *International Journal of Wildland Fire*, 31(12), 1103-1113.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Ulibarri, N. (2015). Tracing Process to Performance of Collaborative Governance: A Comparative Case Study of Federal Hydropower Licensing. *Policy Studies Journal*, 43(2), 283-308.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Veronica, V., & Rivabelle, E. (2024). Peranan Aerotravel Dalam Mendukung Keberlanjutan Pariwisata Sebagai Biro Perjalanan Wisata. *Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 139-155.
- Wibowo, L. A. (2008). *Usaha Jasa Pariwisata*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Woldesenbet, W. (2020). Analyzing Multi-Stakeholder Collaborative Governance Practices in Urban Water Projects in Addis Ababa City: Procedures, Priorities, And Structures. *Applied Water Science*, 10(1).